



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir)

Indah Aulia¹, Hasim As'ari²

¹Program Studi Administrasi Publik Universitas Riau, Riau, Indonesia

indahaulia363@gmail.com

hasim_asari99@yahoo.co.id

Received: 2 November 2021; Revised: 10 November 2021; Accepted: 13 November 2021; Published: 15 November 2021; Available online: November 2021.

ABSTRAK

Kecamatan Tapung Hilir menjadi salah satu Kecamatan yang memiliki angka fakir miskin yang tinggi dengan jumlah penerima bantuan 3.157 keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir) dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir). Teori yang digunakan peneliti adalah teori kebijakan, teori implementasi kebijakan dan konsep fakir miskin. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir) dilakukan dengan menerapkan standard dan sasaran, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan sosial dan ekonomi serta disposisi implementor. Terdapat faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir) yakni kurangnya koordinasi dan komunikasi, minimnya jumlah petugas dan penggunaan data lama.

Kata Kunci : Implementasi, Kemiskinan, Program Bantuan

ABSTRACT

Tapung Hilir sub-district is one of the sub-districts that has a high poverty rate with 3,157 families receiving assistance. This study aims to determine the implementation of the Policy for Handling the Poor in Kampar Regency (Case Study in Tapung Hilir District) and the inhibiting factors for the Implementation of the Policy for Handling the Poor in Kampar Regency (Case Study in Tapung Hilir District). The theory used by the researcher is policy theory, policy implementation theory and the concept of the poor. The method used is a qualitative method, using a descriptive approach with data collection techniques in the form of

interviews and documentation. The results showed that the implementation of the Poor Handling Policy in Kampar Regency (Case Study in Tapung Hilir District) was carried out by applying standards and targets, resources, inter-organizational relationships, characteristics of implementing agents, social and economic environmental conditions and the disposition of the implementor. There are inhibiting factors for the implementation of the Policy for Handling the Poor in Kampar Regency (Case Study in Tapung Hilir District), namely the lack of coordination and communication, the minimum number of officers and the use of old data.

Keywords: *Implementation, Poverty, Relief Program*

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan standar mengenai kemiskinan yakni apabila sebuah keluarga yang memiliki 2 anak dengan penghasilan Rp. 1.5 juta sebulan maka termasuk dalam kategori miskin karena memang sudah berada jauh dibawah upah minimum Kabupaten Kampar yang mengalami kenaikan dimana pada tahun 2013 sebesar 1.492.000 rupiah dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2.315.000 rupiah. Pemerintah Kabupaten Kampar juga membenarkan jika standar kemiskinan ini memang berbeda dengan yang ada terutama dengan BPS.

Berbagai dampak yang dapat timbul akibat kondisi kemiskinan diantaranya: dapat meningkatkan angka kekerasan dan kriminalitas di masyarakat seperti pencurian, jambret, narkoba dan juga dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga berdampak bagi tingkat pendidikan dan kesehatan. Dimaksudkan disini

ialah seseorang yang termasuk dalam kelompok fakir miskin akan kesulitan membayar kebutuhan sekolah dan berakhir putus sekolah atau tidak sekolah, begitu juga dengan kesehatan minim yang didapatkan karena ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan. Selain dari ini, tentu banyak dampak buruk yang akan timbul sebagai akibat dari kemiskinan.

Untuk itu pemerintah perlu mengambil tindakan tegas guna mengatasi berbagai permasalahan dan dampak yang timbul akibat kemiskinan. Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat maka pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan, mulai dari yang bersifat umum hingga peraturan yang berfokus pada daerah tertentu saja.

Landasan hukum dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin tertera dalam: UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tercantum dalam Bab IV

Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 yang membahas tentang penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 yang dalam isinya membahas tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Pada tahapan berikutnya dengan fokus yang lebih khusus, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah yang tertuang dalam Peraturan No.10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 mengartikan tentang fakir miskin sebagai orang yang memang sama sekali tidak memiliki sumber penghasilan ataupun mempunyai sumber penghasilan namun tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok yang layak bagi hidupnya. Kebutuhan dasar seperti yang dimaksudkan seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Sebagaimana tertera dalam Perda No 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, mempercepat penurunan jumlah warga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat, menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi

dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.

Jumlah fakir miskin yang ada di Kabupaten Kampar dan juga termasuk kedalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa angka fakir miskin yang ada di tiap-tiap kecamatan berbeda-beda, salah satu Kecamatan yang juga memegang angka tinggi yakni Kecamatan Tapung Hilir dengan jumlah 3.157 kepala keluarga. Kecamatan Tapung Hilir ini sendiri memiliki 16 desa ,diantaranya yaitu: Desa Kota Garo, Kota Aman, Kota Baru, Kota Bangun, Cinta Damai, Beringin Lestari, Tandan Sari, Sekijang, Kijang Makmur, Gerbang Sari, Pandan Sari, Tapung Makmur, Tapung Lestari, Tanah Tinggi, Kijang Jaya, Suka Maju. Dengan total jumlah 14. 393 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk yang ada di 16 desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dengan total jumlah penduduk mencapai 58.509 jiwa.

Jumlah dari fakir miskin yang ada di Kecamatan Tapung Hilir, data menunjukkan bahwa terdapat 3 desa dengan jumlah fakir miskin terbanyak yakni, Desa Kota Garo, Desa Sekijang dan yang terakhir adalah Desa Gerbang Sari. Desa Kota Garo memiliki jumlah 340 orang, kemudian Desa Sekijang dengan jumlah 280 orang dan yang terakhir adalah Desa Gerbang Sari dengan jumlah 162

orang. Dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 10.275 jiwa berdasarkan data penduduk Kecamatan Tapung Hilir Tahun 2020, Kota Garo merupakan Desa yang memiliki jumlah angka fakir miskin tertinggi dengan total 180 orang.

Jika di lihat dalam 5 Tahun terakhir pelaksanaan program-program penanganan fakir miskin dilaksanakan dengan program penerimaan bantuan jaminan hidup miskin, tentu jumlah yang ada antara tahun 2020 dan 2015 sangat berbeda jauh lebih tinggi pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin pada Tahun 2015 masih terbagi-bagi kedalam berbagai kelompok. Sebagai berikut: Kelompok 1 terdiri dari Desa Kota Bangun, Koto Aman dan Kijang Makmur dengan masing-masing memiliki kuota sebesar 6 orang. Kelompok 2 terdiri dari : Desa Tanah Tinggi, Kijang Jaya, Beringin Lestari dan Suka Maju dengan kuota 6 orang. Kelompok 3 terdiri dari Desa Kota Baru, Tandan Sari, Cinta Damai dengan kuota 6 orang. Kelompok 4 terdiri dari Desa Gerbang Sari, Sekijang, Kota Garo dengan kuota 6 orang. Selanjutnya kelompok 5 terdiri dari Desa Tapung Lestari, Tapung Makmur dan Tebing Lestari dengan jumlah kuota 6 orang (Sumber: TSKS Tapung Hilir, Tahun 2015).

Dalam rangka penanganan Fakir Miskin terkhusus di Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin, maka pemerintah daerah bekerja sama dengan Kecamatan yang kemudian di koordinasikan kembali kepada desa-desa untuk menjalankan berbagai program-program yang terdapat dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012. Adapun program-program diantaranya; Program Keluarga Harapan (PKH2), bantuan Operasional Sekolah (BOS), program Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), bantuan Rumah Layak Huni, bantuan UMKM, dan bantuan lainnya seperti Bantuan Dana Bergulir, Bantuan Sosial Beras, Bantuan pangan yakni pemberian subsidi bahan pangan diberikan paling sedikit 4 kali dalam setahun, termasuk juga adanya bantuan Kesehatan yaitu pembebasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Maka dalam menentukan target-target yang akan di berikan bantuan, maka dilakukan survei oleh petugas sosial yang ada di Kecamatan. Penanganan fakir miskin berada dalam pengawasan

Kasi Kesejahteraan Sosial. Melalui Kasi Kesejahteraan Sosial, segala informasi yang ada di sampaikan kepada desa-desa, Kasi Kesejahteraan Sosial juga memiliki fungsi untuk mengontrol dan mengawasi berjalannya segala program yang diadakan. Untuk lebih jelas, dapat dilihat identifikasi masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Kepala Bagian Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial dan wawancara dengan Bapak Camat Tapung Hilir, yang menjelaskan beberapa fenomena terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin:

1. Kecamatan dengan angka fakir miskin yang tinggi
2. Tidak terlaksana dengan baik hak atas air bersih dan sanitasi yang baik. Hal ini dibuktikan juga dengan survei langsung yang dilakukan oleh penulis ke tempat penelitian dan menemukan masih banyaknya rumah-rumah warga yang memiliki air keruh bahkan tidak layak untuk konsumsi
3. Belum terlaksana dengan baik program bantuan perumahan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya terdapat rumah-rumah warga yang tidak layak huni, sudah hampir roboh bahkan berada dalam lingkungan yang becek dan jika hujan turun deras maka memungkinkan untuk rumah tersebut banjir.

4. Ketidaksesuaian data dengan fakta dilapangan terkait ketepatan distribusi bantuan

Dari alasan tersebut penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar" dengan menggunakan Studi kasus yakni di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

KAJIAN LITERATUR

Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku ataupun kelompok politik, untuk memilih tujuan dan cara mencapai sebuah tujuan. Pada dasarnya, pihak-pihak yang membuat kebijakan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Greer dan Paul Hogget dalam (Handoyono, 2012: 5), mengartikan kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang melebihi dari sekedar keputusan spesifik. Sedangkan dalam Implementasi Kebijakan menghubungkan antara tujuan kegiatan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Implementasi kebijakan menurut (Indiahono, 2009: 143) menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Serli Aini (2017: 102) menjelaskan bahwa kinerja dari sebuah kebijakan dipengaruhi oleh beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Serli Aini (2017:104) standar dan sasaran dari sebuah kebijakan tentu haruslah jelas dan terukur, karena jika standar dan sasaran yang digunakan tidak jelas akan menimbulkan kesalahpahaman ataupun multitafsir yang akan berdampak pada keberhasilan sebuah implementasi.

2. Sumber daya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Serli Aini (2017: 104) menjelaskan bahwa sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, sumber daya yang dimaksudkan yakni sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Kedua sumber daya ini dapat menjadi faktor penghambat implementasi sebuah kebijakan apabila tidak terlaksana dengan baik dan benar.

3. Hubungan antar organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Serli Aini (2017: 104) menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan adanya hubungan kerja sama yang baik antar pihak

yang terlibat. Hal ini berkaitan dengan dukungan komunikasi dan koordinasi sebagai realitas dari sebuah program kebijakan yang akan dilaksanakan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Serli Aini (2017: 104-105) menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan yang maksimal dari sebuah implementasi kebijakan maka diperlukan identifikasi dan perlu mengetahui siapa saja agen pelaksana yang mencakup struktur, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

5. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Serli Aini (2017: 105) kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Serli Aini (2017:105) menjelaskan bahwa dalam sebuah implementasi kebijakan sikap implementor sangat berpengaruh

hal ini berkaitan dengan fakta bahwa hasil formulasi suatu kebijakan bukan berasal dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut sehingga mengetahui dengan betul apa permasalahan yang terjadi, melainkan sebuah kebijakan berasal dari para pembuat kebijakan yang biasanya bersifat top down sehingga memungkinkan para pembuat kebijakan tidak mengetahui apa permasalahan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Suryawati (2004) menyebutkan empat bentuk kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, yakni:

- 1) Kemiskinan absolut, yakni penghasilan yang didapat seseorang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- 2) Kemiskinan relatif, yakni akibat dari adanya pembangunan diseluruh lapisan masyarakat hingga membuat terjadinya ketimpangan pendapatan. Ini mengakibatkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau pelosok semakin tertinggal dibandingkan dengan yang hidup di perkotaan.
- 3) Kemiskinan kultural, yakni akibat dari adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang cenderung tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern, seperti malas, cenderung bergantung pada pihak lain.

4) Kemiskinan struktural, yakni bentuk kemiskinan yang umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan, seperti adanya unsur diskriminatif.

Menurut Noor (2009: 288), mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kefakiran dalam hidup seseorang, diantaranya:

- 1) Pendidikan terlalu rendah

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang menyebabkan tidak adanya keterampilan tertentu yang dimiliki seseorang. Adanya keterbatasan pendidikan seseorang menyebabkan terbatasnya pula kesempatan untuk bekerja.

- 2) Malas bekerja

Adanya sikap malas dalam diri seseorang merupakan sebuah permasalahan yang sangat memprihatinkan, dikarenakan berkaitan dengan kepribadian seseorang itu sendiri. Sikap malas dapat menimbulkan sifat acuh dan pasif dalam hidupnya. Seseorang dengan sifat malas, akan cenderung menggantungkan hidupnya pada orang lain.

- 3) Keterbatasan sumber alam

Sumber alam yang tidak dapat lagi memberikan keuntungan bagi masyarakatnya dapat memicu munculnya lapisan kefakiran dalam masyarakat. Beberapa contoh yang dimaksud seperti:

tanah dengan banyak batuan atau mayoritas bebatuan, tidak menyimpan kekayaan mineral, sulit menemukan sumber mata air, dan sebagainya.

4) Terbatasnya lapangan pekerjaan

Terbatasnya lapangan pekerjaan membawa dampak kemiskinan bagi masyarakat. Tersedianya lapangan pekerjaan akan sangat membantu perekonomian masyarakat, sebaliknya semakin sedikit tersedia lapangan pekerjaan, maka semakin sulit masyarakat kurang mampu mendapatkan pekerjaan dan akan semakin terpuruk perekonomian masyarakat.

5) Keterbatasan modal

Untuk dapat memulai suatu usaha, modal merupakan hal utama yang harus di perhatikan, baik itu usaha besar ataupun usaha kecil. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh masyarakat menjadi pemicu tidak berkembang dan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

6) Beban keluarga

Jumlah anggota keluarga, semakin banyak jumlahnya tentu akan mempengaruhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan jumlah pengeluaran. Apabila tidak terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan.

Kenaikan pendapatan yang diimbangi dengan pertambahan jumlah anggota keluarga, akan menyebabkan kemiskinan tetap melanda keluarga tersebut.

Penelitian Terdahulu

Berikut ini penulis lampirkan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu:

1) Rila Azwa (2014), melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, dimuat dalam eJournal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini memfokuskan pada penurunan angka kemiskinan di Desa Bukit Melintang dan bagaimana upaya penanganan fakir miskin di desa tersebut. Dengan hasil penelitian menemukan masih terdapat beberapa permasalahan dan ketidaktepatan dalam pelaksanaan yang mana telah ditetapkan sesuai dengan tujuan.

2) Muhammad Afrialdi (2017) dengan judul penelitian Efektivitas Program Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar Studi Kasus

Bantuan Peningkatan Keterampilan di Kelurahan Sungai Pagar, yang dimuat dalam Jom Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini memfokuskan pada penanganan fakir miskin di Kelurahan Sungai Pagar dan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan fakir miskin. Dengan hasil penelitian menemukan fakta bahwa terjadinya kurang informasi, yakni para tim ataupun pelaksana masih belum mengetahui secara penuh tentang bagaimana keadaan masyarakat yang nantinya akan menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan program yang nantinya akan membantu mengurangi tingkat fakir miskin di Kelurahan Sungai Pagar.

3) Rifqil Khairi (2015) dengan judul penelitian Implementasi Program Zero Kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk Mengurangi Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Studi pada Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, yang dimuat dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian program yang diharapkan dapat menangani kemiskinan di Kabupaten Kampar. Dengan hasil penelitian menemukan fakta bahwa adanya program ini telah berjalan, namun masih ditemukan hambatan-

hambatan dalam pelaksanaannya, untuk itu diharapkan pemerintah terus memperbaiki keberlangsungan program ini.

4) Sri Iryani (2015) dengan judul penelitian Penanganan Fakir Miskin Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 yang dimuat dalam Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini berfokus pada langkah-langkah dan upaya pengentasan fakir miskin di Kecamatan Kuok, selain itu juga menjalankan beberapa program-program seperti bantuan pangan, pendidikan, perumahan dan lainnya. Dengan hasil penelitian pelaksanaan dari berbagai program yang telah ditetapkan sudah berjalan dengan baik, namun masih tetap memerlukan pengawasan agar program dapat berjalan lebih maksimal.

5) Liza Indrasari (2017) dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Jepara yang dimuat dalam eJournal Ilmu Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan meningkatkan angka anak usia sekolah di kalangan fakir miskin. Dengan hasil penelitian, yaitu program telah terlaksana dan proses implementasi berjalan

lancar namun terlaksananya program ini tidak berfokus pada fakir miskin saja namun juga kepada seluruh anak-anak yang tidak bersekolah walaupun tidak berada pada tahapan yang disebut fakir miskin.

6) Marselinus Bin Hendrikus (2016) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Nunukan yang dimuat dalam eJournal Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian dan menganalisa program kelompok usaha bersama dalam tujuan menanggulangi kemiskinan. Dengan hasil penelitian menemukan berbagai faktor pengambat yang ada dalam pelaksanaan program ini bahkan menemukan berbagai usaha yang berakhir bubar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dengan sifat analisis deskriptif. Dalam prosesnya, pendekatan kualitatif mengumpulkan berbagai data yang didapatkan dengan mengajukan atau memberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan,

mengumpulkan data yang spesifik dari narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti, dilanjutkan dengan menganalisis data yang didapat, menjabarkan dengan menggunakan metode induktif atau dapat diartikan dengan menjelaskan dari khusus ke umum.

Studi kasus merupakan bagian dalam penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan pendekatan yang hanya berfokus pada satu kasus untuk diamati dan dianalisis secara cermat hingga tuntas atau menemukan hasil yang memuaskan. Penelitian memusatkan diri secara intensif pada satu objek permasalahan dan memahaminya sebagai suatu kasus yang harus dipecahkan. Dalam hal ini penelitian memfokuskan penelitian di Kecamatan Tapung Hilir, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Tapung Hilir, apakah sudah berjalan dengan benar atau justru masih terdapat kendala-kendala.

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mempermudah dalam melaksanakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode

purposive sampling, yakni teknik menentukan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang berkaitan dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan mampu memberikan informasi dan menjawab pertanyaan atau permasalahan dalam penelitian, serta menggunakan teknik triangulasi sebagai metode analisis data.

PEMBAHASAN

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Serli Aini (2017: 102) menjelaskan bahwa kinerja dari sebuah kebijakan dipengaruhi oleh beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan berbagai pihak, yang nantinya akan dijadikan kriteria untuk penentuan fakir miskin, sedangkan sasaran adalah mereka-mereka yang dijadikan fokus utama pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin. Standar dalam penetapan fakir miskin telah ditetapkan melalui Kementerian Sosial. Hal ini berkaitan pula dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan

penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Tapung Hilir menggunakan kriteria yang ditetapkan Kementerian Sosial dan menjadikannya sebagai acuan untuk menetapkan standar dan sasaran penerima program bantuan penanganan fakir miskin. Namun dari hasil wawancara yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa standar dan sasaran yang ditetapkan kurang tepat untuk dijadikan acuan utama dikarenakan sudah tidak sesuai dengan keadaan dimasyarakat untuk itu diperlukanya perbaikan atau penetapan standar yang lebih khusus agar standar dan sasaran yang digunakan sesuai dengan keadaan masyarakat disuatu daerah. Karena faktanya setiap daerah tentu memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda pula. Selanjutnya, masih ditemukanya pemberian bantuan pada masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan, hal ini tentu menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan Kementerian Sosial, sehingga menyebabkan terkendalanya Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar.

2. Sumber daya

a. Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara dengan Bapak Syahrizal, S.STP selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar terlihat bahwa para pelaksana kebijakan penanganan

fakir miskin sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya, mereka bergerak sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Terlihat bahwa para implementor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin memang orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang sesuai dengan bidang yang di kerjakan. Hanya untuk para pemimpin memang harus memiliki keterampilan yang cukup tinggi dikarenakan para pemimpin ini yang akan menghadapi cangkupan yang lebih luas dan rumit, untuk itu diperlukannya pengetahuan yang luas juga.

b. Sumber Daya Finansial (Keuangan)

Sumber daya manusia atau para implementor kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar dapat dikatakan sudah berkompeten, hal ini dikarenakan sumber daya yang ada memiliki pengetahuan terkait kebijakan penanganan fakir miskin karena memang mereka yang ada ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Tidak hanya itu, sumber daya manusia yang ada mampu beradaptasi dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasa nyaman saat berkomunikasi. Namun untuk para pemimpin tertinggi diharuskan untuk memiliki standar dan kemampuan yang

lebih tinggi, hal ini tentu berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi kedepannya. Para pemimpin tertinggi akan menghadapi tantangan yang lebih luas dan rumit untuk itu memang diperlukan seseorang yang memang paham betul dengan bidang ia bekerja.

Selanjutnya terkait sumber daya finansial, yang dalam hal ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin, sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola dan dibagi melalui Kementerian Sosial untuk selanjutnya dilanjutkan ke Dinas Sosial. Tidak ada yang menggunakan dana selain dari APBD.

3. Hubungan antar organisasi

Kerjasama yang dilakukan dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin hanya melibatkan instansi yang juga bergerak di bidang pemerintah, dalam hal lain juga dijelaskan mengenai instansi mana saja yang bekerja sama dalam pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin. Dari hasil wawancara dengan Bapak Syahrizal, S.STP selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar, dapat dilihat bahwa kerjasama yang dilakukan pada tingkat awal

adalah dengan Kementerian Sosial yang dalam hal lain juga merupakan pihak yang menetapkan standar dan sasaran fakir miskin, selanjutnya dari Dinas terkait dilanjutkan ke tingkat Kecamatan dan selanjutnya ke Desa. Dari hasil wawancara dengan Bapak Yuricho Efril S.STP selaku Camat Tapung Hilir dapat dilihat bahwa tidak ada kerja sama yang dilakukan terkait pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin, jika ada kerja sama maka pihak tersebut hanya akan menjadi donatur dan tidak terlibat dalam penetapan standar dan sasaran penerima bantuan penanganan fakir miskin.

Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin, tidak ada kerja sama yang dilakukan dengan pihak diluar pemerintahan, para implementor hanya melibatkan pihak atau instansi yang masih terkait dengan pemerintahan, dalam hal ini diawali dengan Kementerian Sosial untuk selanjutnya diarahkan ke Dinas terkait yang dalam hal ini merupakan Dinas Sosial, dari Dinas Sosial selanjutnya disampaikan kepada tiap-tiap Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan hingga ke tingkat desa. Koordinasi dan komunikasi terkait Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan lancar, baik itu kepada Dinas ataupun Desa.

Namun demikian, penulis juga menemukan permasalahan yakni

tidak adanya pemberian waktu yang cukup bagi tim koordinasi/petugas sosial untuk dapat menyiapkan data penerima bantuan yang dalam hal ini adalah bantuan penanganan fakir miskin, selain itu penulis juga menemukan fakta minimnya pemberian informasi pada masyarakat terkait penanganan fakir miskin justru masyarakat banyak mendapat informasi dari media sosial. Seharusnya masyarakat mendapat informasi yang cukup terkait bantuan yang diberikan pemerintah. Salah satu alasan yang menyebabkan masyarakat minim informasi yakni karena tidak dilaksanakannya sosialisasi, ini sebagai dampak minimnya waktu yang diberikan sehingga tim koordinasi atau petugas sosial tidak memiliki waktu untuk memberikan sosialisasi karena waktu yang ada sudah digunakan untuk melakukan pendataan masyarakat penerima bantuan bahkan itupun masih dikatakan memerlukan waktu tambahan. Dari kesimpulan semua wawancara penulis menyimpulkan hubungan antar organisasi yang dalam hal ini mencakup koordinasi dan komunikasi, dapat dikatakan belum maksimal.

4. Karakteristik agen pelaksana

Implementasi Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar memiliki tim khusus yakni petugas PSM yang bertugas melakukan pendataan pada masyarakat, dalam pelaksanaan kebijakan

penanganan fakir miskin ada petugas sosial yang secara khusus menjalankan kebijakan ini, namun minimnya jumlah petugas yang ada menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan, karena dengan jumlah masyarakat yang banyak 1 petugas bisa membahawai 3-4 desa. Dari hasil wawancara dengan Bapak H.Ilyas selaku Kepala Desa di Desa Kota Garo dapat dilihat bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin memerlukan pendamping yang memang hanya berfokus pada penanganan fakir miskin, menimbang minimnya jumlah petugas yang ada maka perlu adanya penambahan jumlah petugas agar kebijakan dapat berjalan lebih maksimal.

Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan oleh petugas PSM/tim koordinasi elain itu juga bekerja sama dengan petugas PKH (Program Keluarga Harapan). Namun demikian dirasa masih kurang untuk dapat mencakup 16 desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir, dan diharapkan ada penambahan petugas untuk dapat memaksimalkan implementasi kebijakan, karena dengan jumlah petugas yang ada 1 petugas membawahi 4 desa dirasa kurang efektif untuk dapat menjangkau semua masyarakat. Petugas merasa kewalahan dalam melakukan pendataan, tidak

hanya dalam melakukan pendataan saja tetapi juga dalam mensubsidikan bantuan, petugas sosial harus menghadapi banyak masyarakat, belum lagi saat pembagian bantuan disaat yang sama pula petugas sosial harus mendata dan memverifikasi kelengkapan persyaratan untuk mengambil bantuan. Untuk itu sangat diharapkan adanya penambahan petugas sosial, setidaknya 1 petugas membawahi 1 desa, dengan demikian pendataan dan pensubsidian bantuan bisa berjalan dengan baik, hal ini juga dapat meminilisir adanya ketidakcocokan data penerima bantuan dengan fakta di lapangan, karena petugas dapat melakukan pendataan lebih maksimal sesuai dengan standar dan sasaran yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan pada karakteristik agen pelaksana dapat dikatakan belum maksimal karena segala macam kegiatan dan tugas belum berjalan dengan baik.

5. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Dari hasil wawancara dengan Bapak Syahrizal S.STP selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar dapat diketahui bahwa respon dari masyarakat sangat

bagus, masyarakat antusias dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah terlebih lagi dengan kondisi perekonomian yang terhambat karena adanya pandemi covid-19 ini, masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan. Terlihat juga bila peran masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin sangat bagus, masyarakat sangat antusias dan hal baik lainnya masyarakat bisa diberi arahan dan mengikuti arahan dengan baik.

Masyarakat sangat antusias terhadap program bantuan yang diberikan pemerintah, apalagi dalam masa pandemi seperti saat ini tentu masyarakat merasa sangat terbantu, selain itu sikap teratur masyarakat memudahkan petugas sosial untuk memberikan arahan dalam mensubsudikan bantuan terkait pemberian bantuan penanganan fakir miskin. Dengan sikap teratur yang dilakukan masyarakat dapat meminimalisir terjadinya kericuhan, karena tidak jarang saat pemberian bantuan, akibat banyaknya masyarakat yang susah mengikuti arahan hingga berakibat terjadinya kericuhan.

6. Disposisi implementor

Dari hasil wawancara dengan Bapak Syahrizal, S.STP selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar, dapat dilihat bahwa petugas sosial yang berfokus pada Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin pastinya

sangat mendukung dan ingin mensukseskan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin, selain itu juga dapat di pastikan bahwa tiap petugas sosial melaksanakan tugas dengan maksimal untuk mencapai tujuan yakni menurunkan angka fakir miskin. Serta dapat dilihat bahwa para petugas sosial atau dapat dikatakan para implementor mendukung dan berusaha melaksanakan kebijakan dengan sebaik mungkin. Hal ini dibuktikan dengan sikap petugas sosial/para implementor yang berhati-hati dalam melakukan pendataan, jeli dalam melihat dan mendata agar nantinya masyarakat yang namanya terdaftar memang masyarakat yang membutuhkan, sehingga tujuan dari Kebijakan Penanganan Fakir Miskin dapat tercapai dengan maksimal.

petugas sosial/para implementor ikut mendukung untuk mensukseskan Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin, petugas sosial/para implementor berusaha untuk dapat melaksanakan dan mendukung keberhasilan terkait Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar. Diawali dengan melakukan pendataan untuk dapat menentukan sasaran masyarakat penerima bantuan penanganan fakir miskin.

Meskipun petugas sosial/para implementor mendukung dan berusaha untuk mensukseskan

Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar, namun faktanya masih ditemukannya petugas sosial/para implementor yang memiliki respon lama dalam memberikan informasi hal ini dibuktikan dengan seringnya masyarakat yang harus bolak balik Kantor Desa untuk mendapatkan informasi terkait Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin yaitu pemberian bantuan. Sejalan dengan pernyataan yang diberikan informan pada wawancara sebelumnya, permasalahan ini berkaitan dengan tidak dilaksanakannya sosialisasi hingga masyarakat menjadi minim informasi padahal seharusnya masyarakat mendapat banyak informasi terkait kebijakan penanganan fakir miskin. Jika permasalahan ini dikaitkan kembali tentu juga akan sejalan dengan minimnya waktu yang diberikan untuk petugas sosial/tim koordinasi melakukan pendataan hingga membuat petugas sosial/tim koordinasi hanya fokus untuk melakukan pendataan dengan waktu yang sedikit, tanpa memikirkan untuk memberikan sosialisasi yang berujung minimnya informasi yang didapat masyarakat hingga mau tidak mau memaksa masyarakat untuk datang langsung ke Kantor Desa mendapatkan informasi ataupun mencari sendiri informasi di internet.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar

1. Kurangnya koordinasi antar aktor

Koordinasi yang dilakukan Pemerintah kurang lancar, hal ini dibuktikan dengan minimnya waktu yang diberikan untuk petugas sosial/tim koordinasi dapat mendata dan menetapkan siapa saja penerima bantuan terkait Penanganan Fakir Miskin, adanya kesan mendesak yang dirasakan petugas sosial membuat kurang maksimalnya pendataan. Petugas sosial juga kesulitan untuk memvalidasi data dan melakukan sosialisasi akibat minimnya waktu yang diberikan. Selain itu kurangnya pemberian informasi kepada masyarakat terkait Penanganan Fakir Miskin menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, hal ini dibuktikan banyaknya masyarakat yang justru mendapatkan informasi dari media sosial dibandingkan dari pemerintahan. Kedua hal ini sangatlah berkaitan satu sama lain.

2. Minimnya Petugas Sosial

Kurangnya jumlah petugas sosial untuk survei langsung kelapangan guna melakukan pendataan dan mensubsidikan bantuan. Banyaknya desa dan juga

banyaknya masyarakat menjadi kendala yang harus dihadapi petugas sosial/tim koordinasi dalam melakukan survei langsung kelapangan, hal ini akan membuat petugas sosial merasa kewalahan dengan jumlah masyarakat yang banyak.

Belum lagi kendala jarak antara satu desa dengan desa lainya juga mempengaruhi kecepatan petugas sosial/tim koordinasi. Adanya penambahan petugas diharapkan mampu memudahkan petugas sosial/tim koordinasi untuk melakukan survei. Selain memudahkan, dengan adanya penambahan petugas sosial/tim koordinasi dapat menjadikan lebih terfokus tentu hal ini akan mempengaruhi kevalidan data yang dihasilkan. Dengan demikian kebijakan penanganan fakir miskin dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.

3. Data Fakir Miskin Tidak Update

Pemberian bantuan terkait Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar ada ketidaksesuaian dengan yang terjadi dilapangan, hal ini dikarenakan data yang digunakan merupakan data lama dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Masih menggunakan data DTKS yang lama dan belum direvisi, sehingga masyarakat yang menerima bantuan sudah tidak sama lagi keadaan perekonomiannya. Fakta lainnya

yakni masih adanya masyarakat yang tidak memiliki surat-surat penting, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Padahal surat-surat tersebut sangat diperlukan untuk melakukan pendaftaran, karena terdapat data-data yang perlu diisi dan data tersebut merupakan data diri yang sah.

Selanjutnya, akibat yang timbul dikarenakan menggunakan data lama adalah banyak masyarakat yang tergolong mampu namun masih menerima bantuan, ini dapat menimbulkan permasalahan baru di masyarakat karena akan ada rasa tidak terima dan tidak adil bagi masyarakat yang memang seharusnya menerima bantuan, hal ini tentu bisa memicu adanya keributan atau kegaduhan dimasyarakat. Permasalahan lain yang juga akan muncul yakni penggunaan data yang lama dapat menghambat tercapainya tujuan awal Kebijakan Penanganan Fakir Miskin, hal ini dibuktikan pula dengan adanya bantuan yang diberikan namun tidak tepat sasaran.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Tapung Hilir belum efektif, jika dicocokkan dengan

tujuan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan juga belum sesuai dengan kriteria keberhasilan implementasi sebagaimana pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Serli Aini (2017:102). Serta terdapat beberapa hambatan yang perlu dibenahi seperti kurangnya koordinasi antar aktor, kurangnya jumlah petugas sosial, dan data fakir miskin yang tidak update..

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agus Purwanto Dkk, Erwan. 2015. *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Agus Purwanto, Erwan. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Aneta, A. (2010). implementasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kota Gorontalo. *jurnal administrasi publik, volume 1 No1 12*.
- azwa, r. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *jurnal mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru* , 40.
- Choiriyah. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan. *Islamic Banking Volume 3 Nomor 2 Edisi Februari 2018* 17 , 14.
- Creswell, J.W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan*
- Eko Agustinova, Danu. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Candi Gerbang
- Emalia, Sulfa. "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandar Lampung". Dalam: *Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung*. Vol. 6 (1): 46-54.
- Endeng. (2018). implementasi undang-undang nomor 13

- tahun 2011 tentang
penanganan fakir miskin
dalam kebijakan pengentasan
kemiskinan di
Kabupaten Karawang. *jurnal
hukum Positum Vol 3, No. 2,
Desember* , 79-105.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok
Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia
Indonesia.
- hendrikus, m. b. (2016).
implementasi kebijakan
penanggulangan kemiskinan
melalui program
pemberdayaan fakir miskin
kelompok usaha bersama di
Kecamatan
Nunukan. *program pasca
sarjana Universitas Terbuka
Jakarta* , 156.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady
Akbar. 2008. *Metodologi
Penelitian Sosial*. Bandung:
Bumi Aksara.
- Indrasari, L. (2017). Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2014 Tentang
Penanganan Fakir Miskin.
*Jurusan Politik dan
Kewarganegaraan UNS* , 54.
- iryani, s. (2015). penanganan fakir
miskin di kecamatan kuok
kabupaten kampar
menurut peraturan daerah
nomor 10 tahun 2012 . *jurnal
mahasiswa Universitas
Sultan Syarif Kasim Pekanbaru* ,
55.
- Mixed. Yogyakarta: Pustaka
Belajar.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi
Penelitian Kualitatif*. Bandung:
Remaja Rosdakarya.
- Roebyantho, H. (2017).
Implementasi Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan
Melalui Porgram
Rehabilitasi Sosial Rumah
Tidak Layak Huni
(RTLH), DI.
*Perbankan Syariah STEBIS IGM
Palembang* , 20.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis
Kebijakan Publik : Konsep, Teori
dan Aplikasi*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar